



PT. BPR TAPIN SELATAN MANDIRI
SEJAHTERA

LAPORAN

PENERAPAN TATA KELOLA

Tahun 2021

🏠 Jl. A.Yani No.97 Tambarangan, Tapin

☎ 082148131078

📄 -

Sistem Informasi Laporan Tata Kelola - Mandiri Consulting



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

Melindungi kepentingan stakeholder.

Melindungi kepentingan stakeholder.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR TAPIN SELATAN MANDIRI SEJAHTERA

1 Transparency (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Perseroan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku..

2 Accountability

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders..

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar

4 Independency

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran .

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi | |
|---|--|--|
| 1 | Nama | : HIPKA MUBADI, SE |
| | Jabatan | : 0100 - Direktur Utama |
| | Tugas dan Tanggung Jawab | : - Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, melakukan pengawasan dan pelaksanaan seluruh kegiatan operasional BPR. - Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. - Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. |
| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi | |
| 1 | Nama | : HJ NOORJANAH ARPAN, SE |
| | Jabatan | : 0200 - Direktur |
| | Tugas dan Tanggung Jawab | : - Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, melakukan pengawasan dan pelaksanaan seluruh kegiatan operasional BPR. - Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. - Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. - Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. - Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. - Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan. |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris | | |
| <p>Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang</p> | | |

Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris | |
|----|--|--|
| 1 | Nama | : DR. MUHAMMAD SYAUKANI, ST, M.CS, M.KOM |
| | Jabatan | : Komisaris Utama |
| | Tugas dan Tanggung Jawab | : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 4. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR kecuali terkait dengan Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit dan Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggungjawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR. |
| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris | |
| 1 | Nama | : IWAN RACHMADI, SE |
| | Jabatan | : Komisaris |
| | Tugas dan Tanggung Jawab | : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 4. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR kecuali terkait dengan Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit dan Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. |

5. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggungjawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.

Rekomendasi Kepada Direksi

Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang

Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem

Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

| No | Tugas dan Tanggung Jawab Komite |
|----|--|
| 1 | Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : - |
| 2 | Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : - |
| 3 | Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : - |

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

| No | Nama | Keahlian | Komite | | | Pihak Independen |
|----|------|----------|--------|-----------------|-----------------------|------------------|
| | | | Audit | Pemantau Risiko | Remunerasi & Nominasi | |
| - | - | - | - | - | - | - |

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

| No | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite |
|----|--|
| 1 | Komite Audit |
| | Program Kerja : - |
| | Realisasi : - |
| | Jumlah Rapat : - |
| 2 | Komite Pemantau Risiko |
| | Program Kerja : - |
| | Realisasi : - |
| | Jumlah Rapat : - |
| 3 | Komite Remunerasi dan Nominasi |
| | Program Kerja : - |
| | Realisasi : - |
| | Jumlah Rapat : - |

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

| No | Nama Anggota Direksi | Nominal | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|------------------------|---------|----------------------------|
| 1 | HIPKA MUBADI, SE | - | - |
| 2 | HJ NOORJANAH ARPAN, SE | - | - |

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| No | Nama Anggota Direksi | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| - | - | - | - | - |

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keuangan | | |
|----|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | HIPKA MUBADI, SE | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| 2 | HJ NOORJANAH ARPAN, SE | tidak ada | tidak ada | tidak ada |

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keluarga | | |
|----|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | HIPKA MUBADI, SE | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| 2 | HJ NOORJANAH ARPAN, SE | tidak ada | tidak ada | PEMKAB TAPIN-Saudara Kandung |

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Nominal | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|--|---------|----------------------------|
| 1 | DR. MUHAMMAD SYAUKANI, ST, M.CS, M.KOM | - | - |
| 2 | IWAN RACHMADI, SE | - | - |

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| - | - | - | - | - |

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan | | |
|----|--|------------------------------|-----------------|----------------|
| | | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1 | DR. MUHAMMAD SYAUKANI, ST, M.CS, M.KOM | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| 2 | IWAN RACHMADI, SE | tidak ada | tidak ada | tidak ada |

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga | | |
|----|--|------------------------------|-----------------|----------------|
| | | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1 | DR. MUHAMMAD SYAUKANI, ST, M.CS, M.KOM | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| 2 | IWAN RACHMADI, SE | tidak ada | tidak ada | tidak ada |

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

| No | Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun) | Direksi | | Dewan Komisaris | |
|-------|----------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1 | Gaji | 2 | 182.132.880 | 2 | 150.210.000 |
| 2 | Tunjangan | 2 | 185.050.000 | 2 | 0 |
| 3 | Tantiem | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Kompensasi berbasis saham | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Remunerasi lainnya | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total | | | 367.182.880 | | 150.210.000 |

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

| No | Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) | |
|----|--------------------------------------|--|-----------------|
| | | Direksi | Dewan Komisaris |
| 1 | Perumahan | 0 | 0 |
| 2 | Transportasi | 0 | 0 |
| 3 | Asuransi Kesehatan | 0 | 0 |
| 4 | Fasilitas lainnya | 0 | 0 |

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

| Keterangan | Perbandingan | |
|--|--------------|---|
| | (a/b) | 1 |
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) | 3,89 | 1 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b) | 1,39 | 1 |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1,25 | 1 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b) | 2,56 | 1 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b) | 2,32 | 1 |

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan |
|----|---------------|----------------|---|
| 1 | 2021-5-24 | 25 | Pembahasan Target, Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Struktur Organisasi Baru |
| 2 | 2021-6-9 | 7 | Rencana Bisnis BPR, Isu-Isu Strategis BPR (Kebijakan dan Prosedur Kredit), Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis dan atau Evaluasi Relisasi Rencana Bisnis BPR |
| 3 | 2021-7-13 | 5 | Evaluasi Kinerja BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera secara keseluruhan, untuk pencapaian target baik sisi kredit, dana, penyelesaian kredit bermasalah dan SDM |
| 4 | 2021-8-20 | 5 | Penghapusan/Penjualan Aset Inventaris Mobil CRV |
| 5 | 2021-9-7 | 20 | Evaluasi Kinerja BPR, Pemetaan Kondisi Terkini Kredit Bermasalah dan Efisiensi Biaya |
| 6 | 2021-10-26 | 15 | Konsolidasi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja |
| 7 | 2021-11-26 | 12 | Rapat 3 Bulanan dan Evaluasi Rutin |

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Jumlah Peserta | | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|----|--|----------------|----------------|-----------------------------|
| | | Fisik | Telekonferensi | |
| 1 | DR. MUHAMMAD SYAUKANI, ST, M.CS, M.KOM | 6 | 1 | 100,00% |
| 2 | IWAN RACHMADI, SE | 6 | 1 | 100,00% |

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

| Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | Jumlah kasus yang dilakukan oleh | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------|-----------------|------|---------------|------|---------------------|------|
| | Direksi | | Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Total Fraud | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telah Diselesaikan | | - | | - | | - | | - |
| Dalam proses penyelesaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belum diupayakan penyelesaiannya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | | - | | - | | - | | - |

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

| Permasalahan Hukum | Jumlah (satuan) | |
|---|-----------------|--------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | - | - |
| Dalam proses penyelesaian | - | - |
| Total | - | - |

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

| No | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | | | Pengambil Keputusan | | | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan |
|----|--|---------|-----|-------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|------------|
| | Nama | Jabatan | NIK | Nama | Jabatan | NIK | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Hj. Noorjanah Arpan, SE | Direktur Operasional dan Kepatuhan | 630501430867000 0 1 | | 0 0 | |

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

| No | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan | Penerima Dana | Jumlah Dana (Rp) |
|----|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | 2021-02-11 | Sosial | Kegiatan MTQ | Kantor Urusan Agama Tambarangan | 500.000 |
| 2 | 2021-07-08 | Sosial | Saprah Amal | Madrasah Diniyah Al-Munawwarah | 250.000 |

M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera, Terima Kasih.

Tapin, 20 April 2022

Persetujuan Pengurus PT. BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera



DR. MUHAMMAD SYAUKANI, ST. M.CS. M.KOM
Komisaris Utama




HIPKA MUBADI, SE
Direktur Utama

KERTAS KERJA FAKTOR 1

 NAMA BPR : PT. BPR TAPIN SELATAN MANDIRI SEJAHTERA
 TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|--|-----------------|---|----|----|----|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A | STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | |
| 1 | Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan | X | | | | | Direksi PT BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera berjumlah 2 (dua) Orang dan Direktur Operasional bertindak sebagai Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan |
| 2 | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR | | X | | | | Direksi bertempat tinggal di Kabupaten yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR |
| 3 | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan) | X | | | | | Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan) |
| 4 | Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. | X | | | | | Direksi PT BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris |
| 5 | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud | X | | | | | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan. |
| 6 | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya | X | | | | | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS pada tanggal 14 April 2021 |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 7 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 6 | | 1,17 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 0,59 | | | | | |
| B | PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|----|---|---|---|--|
| 1 | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas | X | | | | | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum |
| 2 | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain | | X | | | | Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2021 |
| 3 | Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris | | X | | | | Menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu |
| 4 | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | | X | | | | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat |
| 5 | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS | | X | | | | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR |
| 6 | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu | X | | | | | membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu |
| 7 | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian | | X | | | | POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat |
| 8 | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. | | X | | | | SK Direksi Nomor 026/SK.DIR/PD.BPR-TS/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 14 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8 | | 1,75 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,70 | | | | | |

| C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | |
|--|---|------|----|---|---|---|
| 1 | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS | | X | | | POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat |
| 2 | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian | | X | | | POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat |
| 3 | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi | | X | | | POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR |
| 4 | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders | | X | | | Terkait indikator Keuangan Utama (Tabungan dan Deposito) penyampaian hasil sesuai RBB Desember 2021 |
| 5 | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan | | X | | | menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 10 | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 5 | | 2,00 | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,20 | | | | |

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 1,49 |
| TOTAL PENILAIAN 1 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 1 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,298 |

KERTAS KERJA FAKTOR 2

 NAMA BPR : PT. BPR TAPIN SELATAN MANDIRI SEJAHTERA
 TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|---|---|-----------------|---|----|----|----|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A | STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | |
| 1 | Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang | X | | | | | SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR |
| 2 | Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan | X | | | | | Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 orang dan Direksi 2 orang |
| 3 | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan | X | | | | | POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan survailen diharapkan dilakukan sebelum masa berlakunya berakhir |
| 4 | Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR | X | | | | | anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR |
| 5 | BPR memiliki Komisaris Independen | | X | | | | PT BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera tidak memiliki Komisaris Independen karena aset masih dibawah 50 M |
| 6 | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat | | X | | | | SK Direksi Nomor 027/SK.DIR/PD.BPR-TS/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas |
| 7 | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum | | X | | | | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya |
| 8 | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi | X | | | | | Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi |
| 9 | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen | X | | | | | PT BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera tidak memiliki Komisaris Independen karena aset masih dibawah 50 M |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 12 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|----|---|---|---|---|
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 9 | | 1,33 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 0,67 | | | | | |
| B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | | |
| 1 | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. | | X | | | | POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan SK Direksi Nomor 027/SK.DIR/PD.BPR-TS/2016 tanggal 20 Desember 2016 |
| 2 | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR | | X | | | | POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR |
| 3 | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan | | X | | | | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR |
| 4 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan | | X | | | | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan |
| 5 | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris | | X | | | | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat 1 bulan sekali untuk mengevaluasi kinerja BPR |
| 6 | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat | | X | | | | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat |
| 7 | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS | | X | | | | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain |
| 8 | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi | | X | | | | POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan SEOJK Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kebutuhan Bagi BPR |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 16 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,80 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|------|---|---|---|---|
| C | HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | |
| 1 | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris | | X | | | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 2 | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1 | | 2,00 | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,20 | | | | |

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 1,67 |
| TOTAL PENILAIAN 2 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 2 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,251 |

KERTAS KERJA FAKTOR 3

 NAMA BPR : PT. BPR TAPIN SELATAN MANDIRI SEJAHTERA
 TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|---|-----------------|---|----|----|----|------------|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A | STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | |
| 1 | BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. | | | | | | |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 0 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1 | | 0,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 0,00 | | | | | |
| B | PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | |
| 1 | Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern | | | | | | |
| 2 | Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko | | | | | | |
| 3 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja | | | | | | |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 0 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 3 | | 0,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,00 | | | | | |
| C | HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | |
| 1 | Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR | | | | | | |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 0 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1 | | 0,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,00 | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 0,00 |
| TOTAL PENILAIAN 3 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 3 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,000 |

KERTAS KERJA FAKTOR 4

 NAMA BPR : PT. BPR TAPIN SELATAN MANDIRI SEJAHTERA
 TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|---|-----------------|---|----|----|----|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A | STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | |
| 1 | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat | X | | | | | SK Direksi Nomor 023/SK.DIR/PD.BPR-TS/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 1 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1 | | 1,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 0,50 | | | | | |
| B | PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | |
| 1 | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut | | X | | | | Tahun 2021 tidak terdapat benturan kepentingan |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 2 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 1 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,80 | | | | | |
| C | HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | |
| 1 | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik | | X | | | | Selama tahun 2021 tidak ada Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 2 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,20 | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 1,50 |
| TOTAL PENILAIAN 4 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 4 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,150 |

KERTAS KERJA FAKTOR 5

 NAMA BPR : PT. BPR TAPIN SELATAN MANDIRI SEJAHTERA
 TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|---|-----------------|---|----|----|----|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | | |
| 1 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana | X | | | | | Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana |
| 2 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan | | | X | | | Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan |
| 3 | Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional | | X | | | | Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan |
| 4 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan | | X | | | | SEOJK Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR |
| 5 | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan | | X | | | | SK Direksi Nomor 008/SK-DIR-TSMS/3/22 tentang Standar Operasional Prosedur Fungsi Kepatuhan |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 10 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 1,00 | | | | | |
| B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | | |
| 1 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya | | X | | | | Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan |
| 2 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini | | X | | | | Melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini tahun 2021 |
| 3 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh | | X | | | | Tahun 2021 BPR menanggapi seluruh |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|---|---|---|--|
| | BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan | | | | | | komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan |
| 4 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan | | X | | | | Memastikan kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan |
| 5 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan | | | X | | | Melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur secara bertahap |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 11 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 5 | | 2,20 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,88 | | | | | |
| C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan | | X | | | | POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR |
| 2 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris | | X | | | | Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris |
| 3 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan akan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 6 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 3 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,20 | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 2,08 |
| TOTAL PENILAIAN 5 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 5 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,208 |

KERTAS KERJA FAKTOR 6

 NAMA BPR : PT. BPR TAPIN SELATAN MANDIRI SEJAHTERA
 TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|--|-----------------|---|----|----|----|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | | |
| 1 | BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern | X | | | | | SK Direksi Nomor 020/SK-DIR-TSMS/5/21 tanggal 24 Mei 2021 tentang Penunjukan Pejabat Eksekutif Audit Intern |
| 2 | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris | | X | | | | SK Direksi Nomor 050/SK-DIR-TSMS/5/21 tanggal 09 Oktober 2021 tentang Pedoman Operasional Audit Intern |
| 3 | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dana) | X | | | | | Pejabat Eksekutif Audit Intern independen terhadap satuan kerja operasional |
| 4 | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama | | X | | | | Sesuai dengan SK Direksi Nomor 027/SK-DIR-TSMS/7/21 tentang Struktur Organisasi tanggal 26 Juli 2021 |
| 5 | BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern | | X | | | | BPR memiliki program pengembangan sumber daya manusia melalui sosialisasi dan pelatihan |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 8 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5 | | 1,60 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 0,80 | | | | | |
| B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | | |
| 1 | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat | | X | | | | SK Direksi Nomor 050/SK-DIR-TSMS/5/21 tanggal 09 Oktober 2021 tentang Pedoman Operasional Audit Intern |
| 2 | BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | X | | | | Melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan BPR |
| 3 | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit | X | | | | | SEOJK Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR dan SK Direksi Nomor 050/SK-DIR-TSMS/5/21 tanggal 09 Oktober 2021 tentang Pedoman Operasional Audit Intern |

| | | | | | | | |
|--|---|------|---|---|---|---|--|
| 4 | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern | | | X | | | BPR telah melaksanakan Zoom meeting Sosialisasi Struktur Data dan Aplikasi OJK-Box/Obox Tanggal 28 September 2021 |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 8 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,80 | | | | | |
| C | | | | | | | |
| HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan | | X | | | | Pejabat Eksekutif audit intern tahun 2021 telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan |
| 2 | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan SEOJK Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR |
| 3 | BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | |
| 4 | BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | | X | | | | POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, SK Direksi Nomor 020/SK-DIR-TSMS/5/21 tentang Penunjukan Pejabat Eksekutif Audit Intern tanggal 24 Mei 2021 dan SK Direksi Nomor 019/SK-DIR-TSMS/5/21 tentang Pemberhentian Pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Intern |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 8 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 4 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,20 | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 1,80 |
| TOTAL PENILAIAN 6 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 6 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,180 |

KERTAS KERJA FAKTOR 7

 NAMA BPR : PT. BPR TAPIN SELATAN MANDIRI SEJAHTERA
 TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|--|-----------------|---|----|----|----|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | | |
| 1 | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud | X | | | | | POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Jasa Keuangan |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 1 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1 | | 1,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 0,50 | | | | | |
| B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | | |
| 1 | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris | X | | | | | Penunjukan KAP berdasarkan RUPS tanggal 14 april 2021 |
| 2 | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. | | X | | | | Melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter tahun 2021 kepada Otoritas Jasa Keuangan |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 3 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2 | | 1,50 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,60 | | | | | |
| C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk | | X | | | | Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR |
| 2 | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Kantor Akuntan Publik Dalam Jasa Keuangan |

| | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|--|
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | 4 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2 | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | 0,20 | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 1,30 |
| TOTAL PENILAIAN 7 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 7 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,033 |

KERTAS KERJA FAKTOR 8

 NAMA BPR : PT. BPR TAPIN SELATAN MANDIRI SEJAHTERA
 TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|---|-----------------|---|----|----|----|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | | |
| 1 | BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko | X | | | | | POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, POJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR dan SK penunjukan PE Menrisk yaitu SK Direksi Nomor 020/SK-DIR-TSMS/5/21 tentang Penunjukan Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko |
| 2 | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko | X | | | | | SK Direksi Nomor 008/SK.DIR/2019 tentang Kebijakan dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko tanggal 27 Juni 2019 |
| 3 | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan | X | | | | | POJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR dan SEOJK Nomor 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 3 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3 | | 1,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 0,50 | | | | | |
| B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | | |
| 1 | Direksi : a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi | | X | | | | SK Direksi Nomor 008/SK.DIR/2019 tentang Kebijakan dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko tanggal 27 Juni 2019 |
| 2 | Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris | | X | | | | SK Direksi Nomor 009/SK.DIR/2019 tentang Pedoman Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko tanggal 27 Juni 2019 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|---|---|---|--|
| 3 | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material | X | | | | | Menyusun Risiko Inheren dan KPMR tahun 2021 |
| 4 | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh | | X | | | | BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh hal ini dibuktikan dengan pemenuhan struktur dan Infastuktur manajemen risiko yang terpenuhi sesuai SK Direksi |
| 5 | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | X | | | | | BPR Telah menerapkan Profil Menris yang diwajibkan OJK atas 4 risiko POJK no 13 dan no 1 tahun 2019 yaitu Kredit, Operasional, Kepatuhan dan Likuiditas tahun 2021 |
| 6 | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh | | X | | | | BPR telah memiliki sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh berupa CBS yang dapat menyediakan data informasi secara lengkap |
| 7 | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko | X | | | | | BPR telah meningkatkan pelatihan menris tahun 2021 melalui sosialisasi Zoom Meeting Ketentuan dan Aplikasi Pelaporan Online OJK (Apolo) Modul Laporan Profil Risiko BPR/BPRS pada tanggal 16 Desember 2021 |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 11 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 7 | | 1,57 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,63 | | | | | |
| C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | X | | | | | Telah melaporkan Laporan Profil risiko tahun 2021 sesuai POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR |
| 2 | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | Tahun 2021 belum menerbitkan aktifitas baru, POJK Nomor 25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 3 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2 | | 1,50 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,15 | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 1,28 |
| TOTAL PENILAIAN 8 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 8 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,128 |

KERTAS KERJA FAKTOR 9

 NAMA BPR : PT. BPR TAPIN SELATAN MANDIRI SEJAHTERA
 TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|---|-----------------|---|----|----|----|--|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | | |
| 1 | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR | X | | | | | POJK Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan SK Direksi Nomor 011/SK.DIR/2020 tentang Pedoman Kebijakan Dampak Penyebaran Covid-19 dengan Ruang Lingkup PPAP, Ayda, BMPK dan Pelatihan SDM |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 1 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1 | | 1,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 0,50 | | | | | |
| B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | | |
| 1 | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan | | X | | | | POJK Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR |
| 2 | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan | | X | | | | POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 4 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,80 | | | | | |
| C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | | |
| 1 | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | X | | | | | Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK |
| 2 | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | X | | | | | Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK |

| | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|--|
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | 2 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2 | 1,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | 0,10 | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 1,40 |
| TOTAL PENILAIAN 9 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 9 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,105 |

KERTAS KERJA FAKTOR 10

 NAMA BPR : PT. BPR TAPIN SELATAN MANDIRI SEJAHTERA
 TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 10 - RENCANA BISNIS

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|--|-----------------|---|----|----|----|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | | |
| 1 | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR | X | | | | | Rencana BPR telah disusun sesuai dengan POJK Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank BPR dan dilaporkan ke OJK |
| 2 | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | Hapus Buku penyelesaian Kredit bermasalah dan rencana inklusi dan literasi BPR |
| 3 | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. | | X | | | | Telah terpenuhi RBB 2021 yaitu yang mana SDM dan CBS jaringan Kantor |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 5 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3 | | 1,67 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 0,84 | | | | | |
| B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | | |
| 1 | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. Penerapan manajemen risiko | | X | | | | Telah mempertimbangkan kondisi pandemi covid-19 untuk menjaga kelangsungan BPR, BPR telah melakukan restrukturisasi kredit berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020 dan No.48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 |
| 2 | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR | | X | | | | Hal ini dibuktikan dengan penyusunan lap pengawasan dekom dengan dibuatnya lap pengawasan tahun 2021 |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 4 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN | | 2,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|------|---|---|---|---|--|
| (P): 2 | | | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40% | | 0,80 | | | | | |
| | | | | | | | |
| C | HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | |
| 1 | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | X | | | | RBB telah disampaikan dan telah dilakukan Revisi sesuai ketentuan OJK | |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 1 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1 | | 1,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,10 | | | | | |

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 1,74 |
| TOTAL PENILAIAN 10 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 10 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,131 |

KERTAS KERJA FAKTOR 11

 NAMA BPR : PT. BPR TAPIN SELATAN MANDIRI SEJAHTERA
 TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

| No. | Kriteria/Indikator | Skala Penerapan | | | | | Keterangan |
|--|--|-----------------|---|----|----|----|---|
| | | SB | B | CB | KB | TB | |
| A | STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) | | | | | | |
| 1 | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | | X | | | | BPR telah melaporkan lap keuangan secara tertib kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak lain melalui sistem informasi pelaporan OJK |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 2 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50% | | 1,00 | | | | | |
| B | PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P) | | | | | | |
| 1 | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | BPR telah melaporkan publikasi setiap triwulan secara tertib kepada OJK POJK Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR dan BFRS secara online |
| 2 | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | POJK Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR dan BFRS secara tertib laporan tahunan dan KAP |
| 3 | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan SK Direksi Nomor 025/SK.DIR/PD.BPR-TS/2016 tentang Pedoman Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah |
| 4 | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara secara tertib ditahun 2021 |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 8 | | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4 | | 2,00 | | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA | | 0,80 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|------|---|---|---|---|
| KELOLA (P): 40% | | | | | | |
| C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H) | | | | | | |
| 1 | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | | X | | | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap |
| 2 | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu. | | X | | | dilaporkan pada akhir semester 4 tahun 2021 |
| HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN | | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN | | 4 | | | | |
| PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2 | | 2,00 | | | | |
| NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10% | | 0,20 | | | | |

| | |
|---|--------------|
| PENJUMLAHAN S+P+H | 2,00 |
| TOTAL PENILAIAN 11 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 11 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO | 0,150 |